

LEGAL STANDING YAYASAN RIAU MADANI DALAM GUGATAN SENGKETA KEHUTANAN

(Suatu Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:
17/Pdt.G/2011/PN.BKN.)

Oleh:

Nama : ACHYAR ROSANDI
NIM : E1A112041

Abstrak: Pergaulan antar manusia tidak lepas dari adanya permasalahan, sebaiknya upaya untuk menyelesaikan masalah dan mempertahankan hak tersebut haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum yaitu dengan gugatan agar tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Seperti halnya Yayasan Riau Madani sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bidang Kehutanan dengan menggunakan gugatan *Legal Standing* mewakili masyarakat di kawasan hutan menggugat PT. Central Lubuk Sawit, dkk, dikarenakan Tergugat I telah merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Penggugat meminta hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai *legal standing* serta mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap ditolaknya gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 17/Pdt.G/2011/PN.BKN.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil Penelitian Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2011/PN.BKN. mengenai *legal standing* Penggugat dan pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum ditolaknya gugatan Penggugat adalah Yayasan Riau Madani mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat karena telah memenuhi syarat Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Kehutanan dan pertimbangan hukum hakim menolak gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak berhasil membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hendaknya Penggugat memastikan dengan benar bahwa obyek sengketa mempunyai relevansi, agar Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menggugat.

Kata Kunci : *Legal Standing*, Yayasan, Gugatan Sengketa Kehutanan.

ABSTRACT

Intercommunication between humans can not be separated from the problems, should an effort to resolve the issue and defend those rights must be carried out according to the provisions of the law, namely with the lawsuit so it wouldn't happen vigilante (eigenrichting). Like the foundation of Riau Madani as non-governmental organizations in forestry sector by using legal standing lawsuit represent the community in forest area sues PT. Central Lubuk Sawit, et al, because first defendant has changed the functions and the allocation of limited production forest area being the area of palm oil plantations. Plaintiffs asked a judge to declare that the defendants did torts. This research aims to find out whether the plaintiffs has a legal standing as well as to find out the consideration of judge and effect laws against the rejection a lawsuit the plaintiff in case of number: 17/Pdt.G/2011/PN.BKN.

This research is a type of normative juridical research which is descriptive. The data used is secondary data which obtained from the literature. The data that collected will be analyzed using method of analysis normative qualitative.

Results Decision Number : 17 / Pdt.G / 2011 / PN.BKN . the legal standing of the plaintiffs and the legal considerations of judges and legal consequences of the rejection of the claim is Yayasan Riau Madani has a legal standing as a plaintiff because it has met the requirements of Article 73 paragraph (2) of the forestry act and legal considerations judge dismissed the Plaintiff's claim , because the plaintiff had not proved the defendants conduct in torts.

Plaintiff should ensure correctly that the object of the dispute has relevance, that the plaintiff has a strong legal basis for suing.

Keywords: Legal Standing, Foundation, Forestry Dispute Lawsuit.